



Pemerintah Kota Prabumulih

Revisi RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata' ala Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena petunjuk dan rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (Revisi Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan yang ditujukan untuk mewujudkan Visi Walikota Prabumulih "**Kota Prabumulih Prima dan Berkualitas 2023**" serta sebagai acuan arah pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih lima tahun kedepan.

Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih disusun dengan maksud menyempurnakan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor: 58/Kpts/DKP/2019 Tentang Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2018-2023. Perubahan ini juga didasari terbitnya Peraturan Daerah Nomor Tahun yang berimplikasi pada perubahan Dokumen Renstra untuk disesuaikan dengan Program dan Kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 50 Tahun 2020.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi pembangunan Ketahanan Pangan di lingkungan strategis yang menyesuaikan terhadap era globalisasi yang selalu berubah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya bagi upaya dan pencapaian pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih

Prabumulih, Juni 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih,

Suranti, SP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19640325 198708 2 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN | |
| 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 16 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan | 16 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan | 19 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 25 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan | 32 |
| 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 34 |
| 3.3 Telaah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2015-2019 | 37 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 40 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 41 |
| BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan pangan..... | 44 |
| BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan..... | 47 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF | 50 |
| BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN | 73 |
| BAB VII. PENUTUP | 77 |

Lampiran *Cascading* / Pohon Kinerja

Sk Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Jumlah PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut Tingkat Pendidikan Formal per 30 September 2020 | 16 |
| Tabel 2.2 Jumlah PNS Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut Pangkat, Jabatan dan Eselon per 30 September 2020..... | 17 |
| Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan jabatan Struktural per 30 September 2020..... | 18 |
| Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Penunjang di Dinas Ketahanan Pangan..... | 19 |
| Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan..... | 22 |
| Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan..... | 23 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2013-2023 Dinas Ketahanan Pangan..... | 46 |
| Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2013-2023 Dinas Ketahanan Pangan..... | 49 |
| Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun Ke 1 dan 2 | 54 |
| Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun Ke 3,4 dan 5 | 62 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 74 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. Alur Penyusunan RENSTRA PD Menurut PERMENDAGRI 86 Tahun 2017..... | 4 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih..... | 15 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor 58/Kpts/DKP/2019. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah perencanaan komprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan OPD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah perencanaan komprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan OPD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Mengacu kepada hal tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan menyusun Perubahan RENSTRA.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta target sasaran pembangunan nasional. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. RPJMD Kota Prabumulih ditetapkan menjadi Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 25 Maret 2019.

Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing subsistem tercermin dalam stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta

pemanfaatan pangan (*food utilization*), termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang berdampak pada peningkatan status kurang gizi/ gizi buruk. Apabila terjadi hal demikian dapat dikatakan daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan selain sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan yang merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan seluruh masyarakat yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan ketahanan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan tugas diembannya pada urusan pangan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan. Dengan kata lain, peran utama Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Renstra dimaksud merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang telah menetapkan bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Dengan adanya Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih melaksanakan Revisi RENSTRA 2018-2023 yang ini menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang ketahanan pangan.

Revisi Renstra ini menjadi acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan dan pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan serta menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan semua program pembangunan di bidang Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan di tahun 2018-2023, dapat menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Prabumulih, sekaligus merupakan acuan resmi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

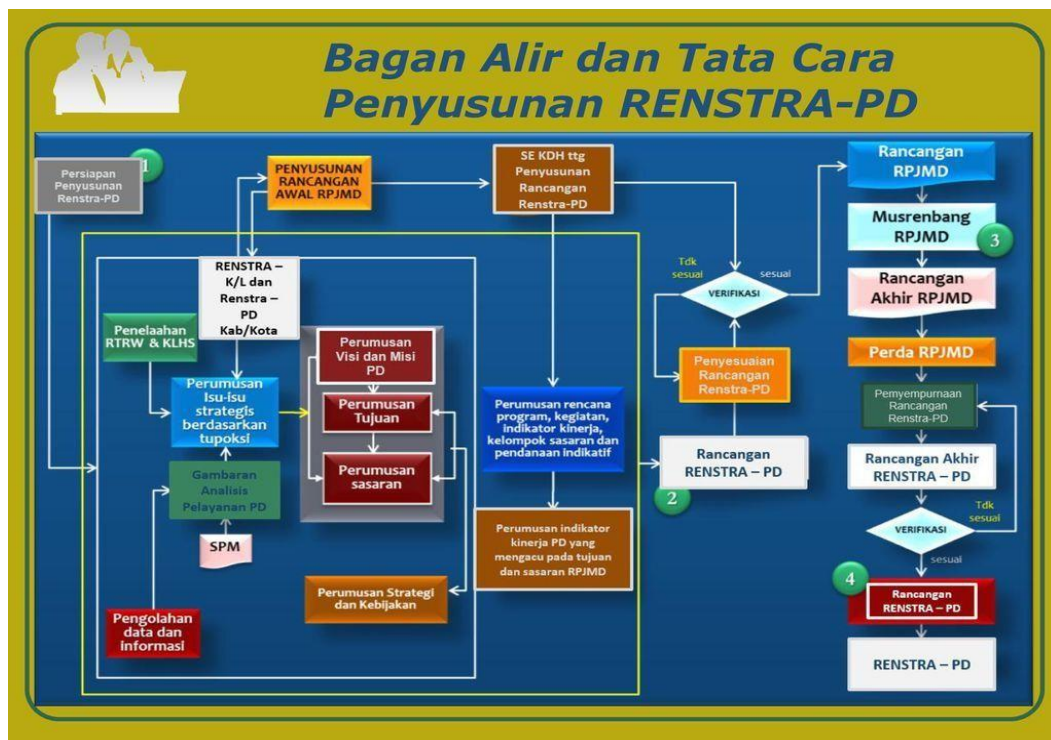
Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ini disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang semula bergabung dengan Penyuluhan Pertanian dan berbentuk Badan, sekarang sudah menjadi Dinas yang khusus menangani Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih menyusun dan menetapkan Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang telah ditetapkan ini akan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam penyusunan Renstra dibutuhkan keselarasan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Prabumulih 2018-2023. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.
Alur Penyusunan Renstra PD Menurut Permendagri 86 Tahun 2017



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
20. Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih 2018-2023;

26. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42);
28. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);
29. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor: 58/KPTS/DKP/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun tujuan disusunnya Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang ketahanan pangan.
2. Sebagai pedoman dan acuan kerja bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih serta pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang ketahanan pangan.
3. Menjadi pedoman dan acuan untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan renstra Kementrian/lembaga dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

Berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Kebijakan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN

Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dibentuk mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Prabumulih nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di bidang Ketahanan Pangan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih nomor 43 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih. Mengacu kepada Perwako diatas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai fungsi:

KEPALA DINAS

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Dekonsentrasi dan pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tentang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

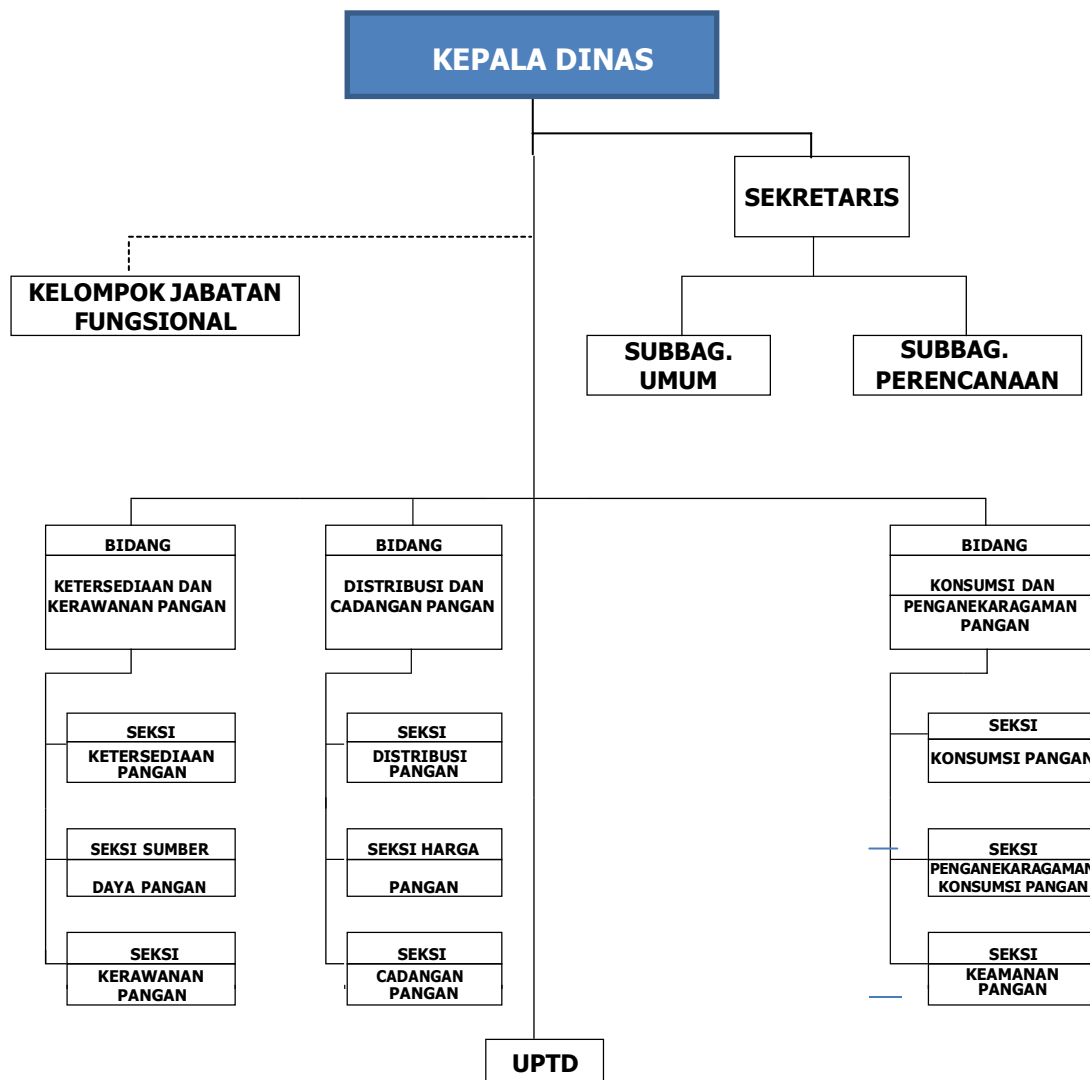
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2. Seksi Sumberdaya Pangan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Distribusi Pangan
 - 2. Seksi Harga Pangan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan
 - 2. Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih



KETERANGAN :

Kelompok Jabatan Fungsional :

- Analisa Ketahanan Pangan
- Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- Analis Pasar Hasil Pertanian

———— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (SDM) aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tercatat sampai dengan 30 September 2012 berjumlah 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) dan orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Menurut Tingkat Pendidikan Formal per 30 September Tahun 2020

| No | Sub OPD | Jumlah | Tingkat Pendidikan | | | | | |
|----|--|-------------|--------------------|-----|-----|----|------------------|----|
| | | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | | | | 1 | |
| 2. | Sekretariat - Sekretaris - Kasubag Umum - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi - Staf | 6 | | | | 1 | 1 1 2 | 1 |
| 3. | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kasi Ketersediaan Pangan - Kasi Sumberdaya Pangan - Kasi Kerawanan Pangan - Staf | 4 | | | | | 1 1 1 | 1 |
| 4. | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan - Kasi Distribusi Pangan - Kasi Harga Pangan - Kasi Cadangan Pangan - Staf | 4 | | | | | 1 1 1 1 | |
| 5. | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Konsumsi Pangan - Kasi Penganekaragaman Pangan - Kasi Keamanan Pangan - Staf | 3 | | | | | 1 1 | 1 |
| | TOTAL | 18 Orang | | | | | | |

Tabel
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih, Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon
per 30 September Tahun 2020

| No | NAMA JABATAN | JUMLAH | Pangkat/Gol | | | | Eselon | | | |
|----|---|--------|-------------|----|-----|----|--------|-----|----|---|
| | | | I | II | III | IV | IV | III | II | I |
| 1 | Kepala Dinas | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 2 | Sekretariat | 6 | | | | | | | | |
| | - Sekretaris | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | - Kasubag Umum | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Staf | 3 | | | 3 | | | | | |
| 3 | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | 4 | | | | | | | | |
| | - Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | - Kasi Ketersediaan Pangan | | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasi Sumberdaya Pangan | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasi Kerawanan Pangan | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Staf | 1 | | | | | | | | |
| 4 | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan | 4 | | | | | | | | |
| | - Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan | | | | | 1 | | 1 | | |
| | - Kasi Distribusi Pangan | 1 | | | | | | | | |
| | - Kasi Harga Pangan | | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasi Cadangan Pangan | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Staf | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 5 | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | 4 | | | | | | | | |
| | - Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | - Kasi Konsumsi Pangan | | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasi Penganekaragaman Pangan | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Kasi Keamanan Pangan | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | - Staf | 1 | | | | | | | | |

Tabel
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan
Jabatan Struktural pada Dinas Ketahanan Pangan Kota
Prabumulih per 30 September 2020

| No | NAMA JABATAN | Jumlah | Nama Diklat Struktural | | |
|----|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Adum/ Diklat Pim IV | Spama/Diklat at Pim III | Diklat Pim II |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | | 1 | |
| 2. | Sekretariat - Sekretaris - Kasubag Umum - Kasubag Perencanaan dan Evaluasi - Staf | 1 1 1 3 | 1 | 1 | |
| 3. | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan - Kasi Ketersediaan Pangan - Kasi Sumberdaya Pangan - Kasi Kerawanan Pangan - Staf | 1 1 1 1 0 | 1 | | |
| 4. | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan - Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan - Kasi Distribusi Pangan - Kasi Harga Pangan - Kasi Cadangan Pangan - Staf | 1 1 1 1 1 | 1 1 | | |
| 5. | Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan - Kasi Konsumsi Pangan - KasiPenganekaragaman Pangan - Kasi Keamanan Pangan - Staf | 1 1 1 1 0 | 1 1 | | |

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah tersedia sarana dan prasarana. (Data berdasarkan Data KIR per 31 Juni 2020).

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Penunjang di Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih

| No Urut | Nama/ sJenis Barang | Asal/Cara Perolehan Barang | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Jumlah |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Mini Bus (Penumpang max14 org) | Pembelian | Baik | 2 |
| 2 | Sepeda Motor | Hibah | Baik | 16 |
| 3 | Kompas Listrik | Pembelian | Baik | 1 |
| 4 | Televisi | Pembelian | Baik | 2 |
| 5 | P.C Unit | Pembelian | Baik | 5 |
| 6 | Camera Electronic | Pembelian | Baik | 4 |
| 7 | Dispenser | Pembelian | Baik | 1 |
| 8 | Lap Top | Pembelian | Baik | 16 |
| 9 | Slide Projector | Pembelian | Baik | 2 |
| 10 | Wireless Amplifier | Pembelian | Baik | 1 |
| 11 | Lemari Es | Pembelian | Baik | 1 |
| 12 | Kursi Lipat | Pembelian | Baik | 10 |
| 13 | Meja Biro | Pembelian | Baik | 3 |
| 14 | Lemari Arsip | Pembelian | Baik | 15 |
| 15 | Rak Piring Aluminium | Pembelian | Baik | 1 |
| 16 | Mesin Ketik Elektronik | Pembelian | Baik | 1 |
| 17 | Meja Biro | Pembelian | Baik | 13 |
| 18 | Kursi Plastik | Pembelian | Baik | 8 |
| 19 | Kursi Kerja | Pembelian | Baik | 4 |
| 20 | Handy Cam | Pembelian | Baik | 2 |
| 21 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Pembelian | Baik | 39 |
| 22 | Printer | Pembelian | Baik | 9 |
| 23 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 4 | Pembelian | Baik | 10 |
| 24 | Mobile Workshop | Pembelian | Baik | 1 |
| 25 | Filling Besi/Metal | Pembelian | Baik | 1 |
| 26 | Galon | Pembelian | Baik | 8 |
| 27 | Peralatan Mini Komputer Lain-lain | Pembelian | Baik | 37 |
| 28 | Peralatan Komputer dll | Pembelian | Baik | 46 |
| 29 | Meja Kerja Pejabat Eselon 4 | Pembelian | Baik | 8 |
| 30 | Burner | Pembelian | Baik | 1 |
| 31 | Alat Penghancur Kertas | Pembelian | Baik | 3 |
| 32 | Kursi Kerja | Pembelian | Baik | 7 |
| 33 | Alat Dapur Lainnya | Pembelian | Baik | 32 |
| 34 | Piring | Pembelian | Baik | 4 |
| 35 | Sendok/garpu | Pembelian | Baik | 8 |
| 36 | Pompa Air | Pembelian | Baik | 1 |
| 37 | Flashdisk | Pembelian | Baik | 14 |
| 38 | Mouse | Pembelian | Baik | 15 |
| 39 | Meja Kerja | Pembelian | Baik | 7 |
| 40 | Facsimile | Pembelian | Baik | 1 |
| 41 | AC Split | Pembelian | Baik | 2 |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Pada indikator meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan pangan dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh produksi dalam daerah yang relatif

rendah sehingga pasokan pangan utama masih berasal dari luar Kota Prabumulih. Dengan pertimbangan diatas upaya pemerintah yaitu dengan tetap menjaga peningkatan pasokan komoditas pangan dari luar dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pertanian terkait peningkatan produksi dalam daerah.

Pada indikator kinerja prosentase penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (PPPD) pencapaian kinerja masih dibawah target yang ditetapkan. Kuota Cadangan pangan yang diukur merupakan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang disimpan di gudang BULOG Divre Sumsel Babel. Realisasi pengadaan cadangan pangan pemerintah kota masih relatif rendah dibandingkan target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan ada pengurangan stok cadangan pangan pemerintah yang digunakan penyaluran bantuan kepada daerah yang terkena bencana alam di Kelurahan Payu Putat Tahun 2015 sebanyak 16,425 Ton. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu menambah stok cadangan pangan pemerintah daerah Kota Prabumulih.

Dari Indikator prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan, realisasi yang diperoleh telah mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya .Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal yang perlu terus dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan. Selain itu perlu dilakukan *ekpose* harga dan stok pangan yang dapat memberikan informasi bagi produsen dan konsumen pangan pokok di Kota Prabumulih.

Pada Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi pada tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dan tahun-tahun sebelumnya walaupun masih jauh dibandingkan dengan target nasional. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta umbi-umbian dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan padi-padian, gula, kacang-kacangan dan lemak/minyak. Kecenderungan antar daerah dengan agroekologi yang sama mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk Kota Prabumulih dan semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Skor PPH Konsumsi untuk Kota Prabumulih tahun

2018 adalah 76 akan tetapi jika dibandingkan dengan saran PPH ideal pada 95,0 maka skor PPH Kota Prabumulih belum mencapai skor PPH yang ditargetkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, insentif kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal, sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras dan terigu.

Indikator kinerja prosentase penanganan daerah rawan pangan, realisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi masih dibawah target yang ditentukan daerah dan nasional. Penanganan daerah rawan pangan belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengatasi kerentanan terhadap rawan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, promosi konsumsi makanan lokal yang ada juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kapasitas produksi terutama melalui peningkatan produktivitas pangan dan gizi di lahan pekarangan. Masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. Secara makro kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih lima tahun kedepan mengacu kepada tabel berikut.

Tabel 2.22
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
Kota Prabumulih

| No | Indikator | Target IKK | Realisasi 2013 | Realisasi 2014 | Realisasi 2015 | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|---|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------------------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) (Ketersediaan Energi dan Protein) | % PPH Ketersediaan | - | Energi 2.200 Protein 57 | Energi 2.061 Protein 62 | Energi 2.152 Protein 62,3 | Energi 2.115 Protein 62,06 | 91,73% | 92% | 93% | 94% | 94% | 91% | 92,5% | | | | 1 | | | | |
| 2 | Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan | % PPH Konsumsi | - | - | - | - | 74,4 | 76,51% | 78% | 80% | 83% | 85% | 76% | 80% | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | 1 | | | | |
| 4 | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota (Ton) | Ton | 11.610 Kg | 5.055 Kg | 4.550 Kg | - | 4.575 Kg | 13,25 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13.250 | 9510 (Total 22.760) | | | | 1 | | | | |

Tabel 2.6 (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih (Tahun 2013-2018)

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|---|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ang gara n | Realis asi |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | | | | | | | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | 0.91 | 1.00 | - | - | | |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | | |
| 6 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | | |
| 7 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | | |
| 8 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | | | | | | | | | | 1.00 | 0.97 | 1.00 | - | | |
| 9 | Program Peningkatan Kesejahteraan | | | | | | | | | | | | - | - | 1.00 | - | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa kinerja anggaran untuk program utama pembangunan ketahanan pangan sudah baik, ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran yang rata-rata lebih dari 0,9 (deviasi realisasi anggaran <10%). Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada periode 2013-2018. Tabel ini menggambarkan bahwa sebagian besar target yang direncanakan pada Renstra periode tersebut tercapai. Hal tersebut berarti pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada periode Renstra 2013-2018 sebagian besar terlaksana dengan baik. Adapun capaian-capaian yang tidak sesuai target ataupun nilai realisasinya 0% merupakan dampak dari keadaan pendanaan yang tidak mendukung sehingga program-program tersebut dikurangi pendanaannya atau bahkan tidak dianggarkan atau tidak dilaksanakan. Perubahan nomenklatur dalam periode tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini juga cukup mempengaruhi perubahan rencana dan capaian target Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur tersebut mengharuskan Perangkat Daerah menambahkan program-program yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan nomenklatur baru, juga meniadakan program-program yang tidak lagi relevan dengan tugas dan fungsi daerah sesuai dengan nomenklatur.

Sama halnya dengan kondisi pencapaian target kinerja yang tidak sesuai target ataupun nilai realisasinya 0%, kondisi nilai anggaran program-program dan kegiatan-kegiatan yang pada tabel anggarannya terlihat berkurang atau bahkan tidak dianggarkan pada tahun berikutnya juga dipengaruhi oleh kondisi pendanaan yang tidak mendukung dan juga dipengaruhi oleh adanya perubahan nomenklatur sebanyak 2 (dua) kali yang semula Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pada periode 2013-2018 rasio antara realisasi dengan anggaran pada setiap tahunnya hampir mencapai nilai 1,0 yang berarti nilai rasio antara realisasi dengan anggaran sudah cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sudah baik sehingga dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan anggarannya dapat terserap dengan baik pula. Pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada periode Renstra 2013-2018 mengalami

sebagian besar mengalami progress yang cukup baik. Akan tetapi perlu adanya penambahan fokus kepada Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mengingat kecenderungan angka konsumsi masyarakat Kota Prabumulih yang masih dominan pada konsumsi energi terutama beras dan terigu. Oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan Penganekaragaman (diversifikasi) pangan dan gizi yang di upayakan melalui program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan

Upaya pemantapan Ketahanan Pangan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat terstruktur tidak dapat terlepas dari kekuatan hukum yang menaungi dan mempertegas kebijakan seperti kelembagaan cadangan pangan, penyusunan Kebijakan/peraturan tentang ketahanan Pangan dan Koordinasi lintas sektor. Mengingat hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan menambahkan program pengembangan dan pemantapan kelembagaan sebagai bagian penting untuk mencapai sasaran pembangunan Ketahanan Pangan lima Tahun kedepan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

1. Analisis terhadap kondisi nasional secara global

Penyediaan pangan dan energy/protein bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat merupakan tantangan global bagi pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Peningkatan jumlah penduduk apabila dikaitkan dengan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara global akan menjadi tantangan yang nyata. Di lain pihak ketersediaan lahan garapan semakin menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah, perluasan industri, perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Sehingga tantangan ke depan dalam pemenuhan pangan dan energi adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta dapat diakses masyarakat.

Kondisi tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng masih relatif rendah. Rendahnya tingkat

konsumsi produk hasil pertanian ini disebabkan masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk hasil pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar ataupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk hasil pertanian Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dan berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut merupakan tantangan yang besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus konsumen bahan pangan pokok. Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga dan sistem distribusi pangan. Oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut.

Dalam tiga tahun terakhir, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Atas dasar situasi tersebut, maka peningkatan produksi pangan alternatif menjadi jalan keluar mutlak yang tidak bisa ditawar walaupun dengan kondisi lahan yang terbatas. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan kelompok dan pemanfaatan pekarangan bagi peningkatan produksi pangan keluarga. Fokus pada analisis basis data aspek ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan/pemanfaatan pekarangan inilah yang menjadi fokus dalam Peningkatan Ketahanan Pangan.

Tantangan ke depan dalam pemenuhan pangan dan gizi adalah bagaimana memanfaatkan serta pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta dapat diakses masyarakat. Keberadaan sumberdaya alam yang terbatas dikelola dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan ketahanan pangan. Kecenderungan masyarakat Kota Prabumulih yang relatif tinggi mengkonsumsi beras dan terigu menjadi pertimbangan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengelola keragaman konsumsi pangan dan gizi yang beragam, bergizi seimbang dan Aman melalui Program Peningkatan Diversifikasi an Ketahanan Pangan Masyarakat. Peluang dari program ini adalah peningkatan konsumsi pangan yang beragam (diversifikasi) melalui pangan olahan, peningkatan ekonomi keluarga melalui kreatifitas pangan olahan yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis terhadap kondisi Provinsi Sumatera Selatan

Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi secara total melebihi ideal, tetapi belum berimbang, terutama kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah masih kurang, sehingga menjadi tantangan ke depan bagaimana meningkatkan produksi kelompok pangan tersebut ataupun impor dari daerah yang surplus.

Kualitas konsumsi pangan penduduk Sumatera Selatan belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga perlu untuk menggali potensi pangan lokal secara maksimal, menggiatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga, dan meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat dalam pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang.

Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen akan mutu dan keamanan pangan, dimana masih banyak dijumpai pangan di tingkat pedagang/ pasar yang mengandung cemaran yang berbahaya atau penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang seperti borak, formalin, rhodamin B dan lain-lain. Dalam mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan serta pengujian mutu dan keamanan

pangan tetapi masih dirasakan kurang penyuluhan dan pengawasan di semua lapisan masyarakat baik di tingkat produsen, penjual dan konsumen.

3. Analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari lahan untuk wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura. Ketersediaan lahan garapan yang sesuai untuk memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang cukup semakin menurun, sehingga pemanfaatan lahan yang ada di antaranya lahan pekarangan masyarakat menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan untuk meningkatkan ketersediaan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan.

4. Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan salah satunya adalah rawan akan terjadinya bencana alam di antaranya banjir yang dapat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan rentan mengakibatkan kondisi darurat/ rawan pangan dan gizi. Sehingga sangat diperlukan adanya program ataupun kegiatan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan tersebut.

5. Tantangan dan Peluang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan pelayanan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (*Treaths*) yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan adalah bagaimana mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi dengan meningkatkan konsumsi pangan dan menerapkan penganekaragaman konsumsi pangan, sebab saat ini

- penganekaragaman konsumsi pangan (diversifikasi) belum terlaksana dengan baik karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang dan pola konsumsi masyarakat sebagian besar masih tergantung dengan beras;
2. Kualitas produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat masih relatif rendah sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kualitas produk pangan olahan salahsatunya dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk pangan olahan yang berkualitas tinggi serta penataan kelembagaan kelompok sasaran;
 3. Kuantitas beras cadangan pangan pemerintah kota saat ini masih sangat rendah dan belum memenuhi SPM. Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kuantitas beras cadangan pangan pemerintah kota harus ditingkatkan salah dengan peningkatan jumlah pengadaan beras sehingga dapat mencapai jumlah yang paling sedikit sama dengan ketentuan SPM;
 4. Cadangan Pangan Pemerintah yang dimiliki belum dikuatkan dengan Peraturan Daerah;
 5. Hal yang juga menjadi tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan adalah bagaimana mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi dengan meningkatkan konsumsi pangan dan menerapkan penganekaragaman konsumsi pangan, sebab saat ini penganekaragaman konsumsi pangan belum terlaksana dengan baik karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang dan pola konsumsi masyarakat sebagian besar masih tergantung dengan beras;
 6. Pertambahan jumlah penduduk yang juga menambah jumlah kebutuhan pangan juga menjadi tantangan bagi pembangunan di bidang ketahanan pangan. Semakin berkurangnya lahan garapan untuk produksi pangan dapat berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan. Sehingga sangat diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi dengan lahan yang terbatas. Program dan kegiatan tersebut di antaranya adalah pembinaan dan pendampingan masyarakat agar aktif dalam memanfaatkan lahan pekarangan terutama

dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Selanjutnya pemanfaatan pekarangan ini diharapkan juga dapat meningkatkan perkonomian masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan;

7. Terbatasnya sistem distribusi, informasi dan akses pangan juga dapat menjadi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Sehingga ke depan sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan sistem distribusi, informasi dan akses pangan untuk menunjang meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan;
8. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang standar mutu dan keamanan pangan yang baik dan kurangnya masyarakat akan pentingnya keamanan pangan yang dikonsumsi sehingga pada periode pembangunan ini sosialisasi tentang standar mutu dan keamanan pangan juga menjadi bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pengawasan standar mutu dan keamanan menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan;
9. Hal lain yang juga sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan adalah terbatasnya jumlah tenaga/ Sumber Daya Manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih baik secara kualitas maupun kuantitas (jumlah PNS hanya 19 orang). Kebutuhan akan tenaga analisis ketahanan pangan juga belum terpenuhi. Kurangnya pelatihan bagi tenaga/ Sumber Daya Manusia berdampak pada tidak terpenuhinya standar kompetensi terutama dalam menjalankan program untuk pembinaan masyarakat. Sehingga pada periode jangka menengah 5 (lima) tahun ini Dinas Ketahanan Pangan sangat perlu untuk menambah jumlah pegawai terutama memenuhi kebutuhan tenaga analisis ketahanan pangan dan meningkatkan kompetensi pegawai.

Peluang–peluang (*Opportunities*) pengembangan pelayanan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, antara lain sebagai berikut :

- a. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah;

- b. Lokasi strategis Kota Prabumulih sebagai daerah yang mudah diakses dari Kota disekitarnya maupun Provinsi, merupakan kemudahan tersendiri bagi pergerakan produk pangan dari perdesaan ke perkotaan atau sebaliknya;
- c. Tuntutan masyarakat akan Pelayanan Prima Terhadap Pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalitas aparatur untuk melakukan inovasi pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- d. Perkembangan teknologi, perhubungan dan transportasi yang semakin berkembang pesat sampai ke pelosok menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan;
- e. Adanya potensi penganeekaragaman pangan di pekarangan yang cukup besar di Kota Prabumulih;
- f. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman tanaman pangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- g. Adanya komitmen Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- h. Tersedianya anggaran yang cukup baik dalam mendukung program ketahanan pangan;
- i. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
- j. Adanya kebijakan nasional percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Diantaranya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana/prasarana, kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam dinamika pembangunan serta perubahan lingkungan strategis di Kota Prabumulih. Sumber Daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tersebut adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan

- a. Kurang optimalnya Dewan Ketahanan sebagai wadah koordinasi lintas sektor perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan tentang Ketahanan Pangan Daerah.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
- c. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dan belum adanya tenaga analis ketahanan pangan;

- d. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani bidang *database* ketahanan pangan terutama karena relatif seringnya pergantian SDM;
- e. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.

3. Pembinaan, Fasilitasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Kota Prabumulih bukan merupakan sentra produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan pokok Kota Prabumulih sebagian besar merupakan pasokan dari daerah lain. Ketersediaan pangan tercukupi sebagian besar dari luar daerah dan posisi strategis Kota Prabumulih mendukung hal tersebut;
- b. Jumlah ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi penduduk Kota Prabumulih berada dalam angka yang mencukupi bahkan surplus;
- c. Cadangan pangan (beras) Pemerintah Kota Prabumulih sampai dengan tahun 2019 masih belum mencapai Penetapan Cadangan Pangan untuk Pemerintah Daerah Kota Prabumulih yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 11/Permentan/KN.130/4/2018 yaitu yaitu 71,39 Ton, sehingga dapat menyebabkan terjadinya rawan pangan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau fluktuasi harga. Oleh karena itu pencapaian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 diharapkan dapat mencukupi angka dimaksud.
- d. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, berbasiskan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA: *Food Security and vulnerability Atlas*);
- e. Terkait distribusi pangan, kondisi/ fasilitasnya infrastruktur dan sarana transportasi pangan, dan pasar Induk, pasar kecil serta kalangan (pasar tradisional tingkat desa) masih perlu diadakan rehabilitasi pengaturan yang baik;
- f. Angka Konsumsi pangan (PPH Konsumsi) penduduk Kota Prabumulih berdasarkan pendekatan konsumsi energi penduduk Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 masih lebih rendah dari standar nasional.
- g. Belum terpenuhinya standar mutu keamanan pangan yang baik.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan

- a. Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan, karena disiplin dalam hal pelaporan belum tertata dengan baik;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/ bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
- c. Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang.

5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas

- a. Kurang maksimalnya kearsipan Dinas
- b. Kurang maksimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.
- c. Masih terdapat kesenjangan komunikasi dengan instansi terkait (*stakeholders*) lintas OPD terkait pelaksanaan komunikasi.

3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kota Prabumulih dalam melaksanakan dalam pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota Prabumulih yaitu: terwujudnya **“KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS 2023”**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Prabumulih merumuskannya dalam empat “Misi” Kota Prabumulih. Ke-empat Misi Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2023 yaitu :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, berkualitas dan berprestasi;
2. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat yang berkualitas, berprestasi, dan religius pada setiap lini kehidupan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
4. Pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/ usaha, serta memantapkan daya saing usaha, usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yg diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih berkaitan langsung dengan Misi Kota Prabumulih yang ke satu dan ke empat.

Misi yang ke satu yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas, dan Berprestasi”** yang sasarannya adalah peningkatan kapasitas dan wawasan Aparatur Pemerintahan; peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan; optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dan peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai pemerintahan

Misi ke empat yaitu **“Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif”** beberapa sasarannya antara lain adalah peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; peningkatan optimalisasi kapasitas dan keterampilan masyarakat; peningkatan penanganan kerawanan pangan dalam pengentasan kemiskinan; pengembangan dan pemantapan kelembagaan dan regulasi ketahanan pangan; optimalisasi hasil-hasil pertanian/ perkebunan/ peternakan dan perikanan; dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.

Peningkatan perekonomian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dilakukan dengan pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pemerintah serta dengan melakukan optimalisasi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan di wilayah Kota Prabumulih. Pemberdayaan dilaksanakan terutama dengan sasaran masyarakat pra sejahtera yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap sarana dan prasarana (lahan, bahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain-lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar pemberian insentif, apresiasi, dan akses terhadap informasi yang bermanfaat. Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan dengan

terus berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan memberdayakan masyarakat.

Beberapa faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kota Prabumulih yang ke empat adalah sebagai berikut :

1. Masih relatif rendahnya angka Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) masyarakat Kota Prabumulih yang mencerminkan pola konsumsi pangan masyarakat kurang beragam, bergizi seimbang dan Aman. Budaya masyarakat Kota Prabumulih dengan konsumsi beras dan terigu yang tinggi ;
2. Kuantitas cadangan pangan yang masih belum memenuhi angka ideal;
3. Belum terpenuhinya standar mutu dan keamanan pangan yang baik;
4. Relatif belum maksimalnya koordinasi lintas sector dengan *stakeholders* terkait;
5. Kualitas dan kuantitas Produk Pangan Olahan masih relatif rendah
6. Pembinaan Kelembagaan kelompok sasaran belum optimal

Beberapa faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Kota Prabumulih yang ke empat adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan (Energi dan Protein) Kota Prabumulih yang sudah mencukupi kebutuhan Kota Prabumulih;
2. Program-program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dan pemanfaatan pekarangan mulai terlihat hasilnya;
3. Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan;
4. Kegiatan-kegiatan peningkatan usaha peningkatan pendapatan masyarakat melalui pangan olahan dan toga mulai dikenal masyarakat dan diminati masyarakat;
5. Kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat dan pemanfaatan potensi pekarangan masyarakat semakin digalakkan untuk pemenuhan pangan dan gizi masyarakat dimulai dari keluarga, meningkat ke kelompok dan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2015-2019

Visi Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”** dengan misi :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat Terhadap Pangan;
3. Mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya kelembagaan dan Budaya Lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih maka visi dan semua misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tersebut terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Beberapa faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat rawan pangan belum teridentifikasi dengan baik;
2. Pola konsumsi pangan yang masih sangat tergantung pada beras yang menunjukkan rendahnya kesadaran penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
3. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan;
4. Rendahnya kepedulian produsen dan pedagang untuk menghasilkan produk pangan yang aman;
5. Lemahnya koordinasi pemerintah di berbagai tingkatan daerah.

Beberapa faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Adanya data KK pra sejahtera sebagai indikator Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk karakteristik kota;
2. Kegiatan-kegiatan peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan;

3. Terpantaunya informasi pasokan dan harga pangan secara periodik;
4. Terpantaunya ketersediaan pangan untuk Kota Prabumulih (NBM PPH) dan angka konsumsi pangan Kota Prabumulih;
5. Adanya kegiatan untuk pengujian pangan segar;
6. Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Visi Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“ Masyarakat Sumatera Selatan Tahan Pangan, Sehat dan Sejahtera ”**. Dengan Misi Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan serta mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan;
2. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan serta terjangkau nya daya akses pangan masyarakat;
3. Mempercepat penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi dalam rangka pengelolaan usaha pangan;
5. Mendorong peningkatan kemampuan aparat dalam manajemen ketahanan pangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih maka visi dan semua misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tersebut terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian misi DKPP Provinsi Sumatera Selatan antara lain

1. Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi secara total melebihi ideal, tetapi belum berimbang;

2. Pola konsumsi pangan masyarakat Kota Prabumulih belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga perlu dilakukan penggalan potensi pangan lokal secara maksimal;
3. Kondisi dan fasilitas infrastruktur dan sarana transportasi pangan, dan pasar Induk, pasar kecil serta kalangan (pasar tradisional tingkat desa) masih perlu diadakan rehabilitasi pengaturan yang baik;
4. Kurangnya pelatihan bagi tenaga/ Sumber Daya Manusia terutama dalam menjalankan program untuk pembinaan masyarakat;
5. Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen akan mutu dan keamanan pangan.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, beberapa faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dapat mempengaruhi pencapaian misi DKPP Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Jumlah ketersediaan energi untuk dikonsumsi masyarakat Kota Prabumulih sudah mendekati standar nasional sebesar 2.400 Kkal/kap/hari.
2. Jumlah ketersediaan protein untuk dikonsumsi masyarakat Kota Prabumulih sudah mendekati standar nasional sebesar 63 gram/kap/hari, dimana ketersediaan protein terbesar masih didominasi dari pangan nabati yaitu kelompok padi-padian (beras).
3. Adanya potensi penganekaragaman pangan;
4. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman tanaman pangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Pola aliran distribusi untuk setiap komoditi pangan di Kota Prabumulih tidak ditemui hambatan dari infrastruktur dan sarana transportasi pangan, dan pasar Induk, pasar kecil serta kalangan (pasar tradisional tingkat desa) sudah cukup banyak di daerah;
6. Adanya teknologi yang semakin berkembang;
7. Tuntutan masyarakat akan Pelayanan Prima terhadap Pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalitas aparatur untuk melakukan inovasi pelayanan di bidang ketahanan pangan.

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 sasaran indikator kinerja ketahanan pangan tahun 2019 adalah : (1) Ketersediaan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hr dan

ketersediaan Protein 63 gr/K.Kal/Kap/Hr ; (2) pencapaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 94,5; (3) penurunan penduduk rawan pangan 1 persen per tahun; (4) pemantauan 11 komoditi pangan pokok yang didistribusikan antar waktu dan antar wilayah koefisien (5) koefisien harga Pangan Strategis $\leq 15\%$; serta (6) Keamanan pangan segar melalui uji laboratorium di bawah ambang batas (dilihat dari cemaran biologis dan kimiawi).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Ruang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kota Prabumulih mengembangkan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan penelaahan aspek - aspek RT/ RW, yang meliputi

1. Struktur tata ruang;
2. Rencana struktur tata ruang;
3. Pola ruang saat ini;
4. Rencana pola ruang;
5. Rencana indikasi program pemanfaatan ruang;

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan ketahanan pangan yang tidak terlepas dari lahan untuk wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura.

Beberapa faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain :

1. Tidak ada data desa rawan pangan;
2. Keterbatasan lahan yang sesuai dengan kriteria kegiatan.

Beberapa faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah antara lain :

1. Dukungan dana baik dari APBD maupun APBN;
2. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman tanaman pangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS, faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dipengaruhi oleh KLHS antara lain adalah penanganan daerah-daerah yang rawan pangan akibat bencana alam terutama banjir terbentur pada birokrasi dalam penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS, beberapa faktor pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dipengaruhi oleh KLHS antara lain:

1. Jumlah wilayah rawan bencana alam banjir tidak banyak;
2. Volume beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPPD) diperkirakan cukup untuk mengantisipasi kondisi darurat pada daerah-daerah dimaksud;
3. Setiap tahunnya tersedia anggaran untuk menambah volume beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

1. Review Gambaran Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan lembaga unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Prabumulih.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dibentuk dan menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari kelaparan dan kemiskinan.

2. Review Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L merupakan program-program dalam menunjang pencapaian visi Misi Badan Ketahanan Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; memperkuat sistem distribusi pangan; meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

3. Review Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DKPP Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L merupakan program-program dalam menunjang pencapaian misi yaitu memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan serta mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan; memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan serta terjangkau nya daya akses pangan masyarakat;

mempercepat penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi dalam rangka pengelolaan usaha pangan; dan mendorong peningkatan kemampuan aparat dalam manajemen ketahanan pangan.

4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi DKP Kota Prabumulih antara lain Penganekargaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Gerakan Optimalisasi Pangan Keluarga, Gerakan Tanam Di Lahan Pekarangan, dan Optimalisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA).

5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi DKP Kota Prabumulih antara lain Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kota Prabumulih dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

6. Isu-isu Strategis

Isu - isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang di prioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan dalam ketersediaan energi dan protein di kota Prabumulih sudah sesuai Standar Nasional Indonesia;
2. Pola Pangan Harapan (Angka Konsumsi) masih di bawah Standar Nasional Indonesia;
3. Belum terjaminnya mutu dan keamanan pangan;
4. Belum optimalnya penjaminan stabilitas harga pangan pokok;
5. Belum optimalnya informasi harga pangan pokok;
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum optimal untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam dan fluktuasi harga sehingga berpotensi menyebabkan kondisi rawan pangan;
7. Sistem Cadangan Pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan atau Lembaga Usaha lainnya belum terbentuk dan belum ada peraturan yang memayungi kebijakan cadangan pangan daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.3. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi Walikota Prabumulih periode 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap misi. Berdasarkan visi dan misi Walikota Prabumulih Dinas Ketahanan Pangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi visi misi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah. Dalam Rangka Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah indikator pencapaian tujuan tersebut yaitu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Prabumulih sampai ketinggian rumah tangga (perorangan), serta meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah. Dalam Hal ini Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan akan terlaksana bila 3 (tiga) sub sistem ketahanan pangan berfungsi baik yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan dalam jumlah yang cukup
- b. Harga dan Akses Pangan yang lancar dan merata, serta
- c. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan serta keamanan pangan dan kehalalannya

Dalam Rangka mencapai tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup
2. Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Tersedianya informasi Harga Pangan Pokok dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis dengan mengukur indikator capaian sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Kota Prabumulih

2. Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Kota Prabumulih
3. Cakupan Informasi Harga Pangan
4. Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun
5. Nilai SAKIP
6. Persentase Tindak lanjut Temuan hasil Pengawasan

Secara Skematis Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ketahanan Pangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 (TC.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

| No. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL (2018) | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|---|--|---|--|----------|---------------------|---|-------|------|---------|------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP A | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Predikat | C | Cc | B | BB | A | AA |
| | | | | Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah | Ketersediaan Pangan yang Cukup, Bermutu dan Terjangkau | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup | Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | % | 91,73 | 92% | 92,5% | 93% | 93,5, % | 94% |
| | | | Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | % | 76,51% | 78% | 80% | 83% | 84% | 85% |
| | | | Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Cakupan Informasi Harga Pangan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun | Ton | 13,25 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengacu kepada Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Prabumulih 2018-2023, Kebijakan Umum Pembangunan Urusan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 adalah: 1) Menjaga stabilitas pangan daerah; dan 2) Berperan serta dalam peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dengan mengacu kepada kebijakan umum pembangunan Ketahanan Pangan, maka di tetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023:

Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Strategi yang diupayakan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan melalui Analisis Ketersediaan Energi dan Protein di Kota Prabumulih (PPH Ketersediaan), Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya lokal, Pemantauan Stok (pasokan pangan), Koordinasi lintas sektor dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat
2. Melaksanakan Pemetaan Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) dan terpenuhinya penanganan kelompok rawan pangan
3. Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Konsumsi melalui Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi, Pemberdayaan masyarakat dan Promosi konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta Koordinasi lintas sektor.
4. Meningkatkan pemantauan harga, distribusi dan akses pangan untuk menjaga stabilitas pangan daerah serta peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
5. Meningkatkan volume beras cadangan pangan Pemerintah Kota secara kontinyu untuk memenuhi target Permentan Nomor 11 Tahun 2018
6. Mengembangkan dan Memantapkan kelembagaan dan regulasi ketahanan pangan
7. Meningkatkan kapasitas & keterampilan masyarakat untuk pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal

8. Meningkatkan Promosi atas hasil produksi pertanian/ tanaman pekarangan/pangan olahan unggulan daerah.

Secara Skematis Strategi dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ketahanan Pangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 (TC. 26)
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2019-2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|--|
| 1. Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup | Meningkatkan Pencapaian Skor PPH Ketersediaan melalui Analisis ketersediaan energi dan protein di Kota Prabumulih (PPH Ketersediaan) | Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Kota Prabumulih Pemantauan Stok Pangan Pokok Strategis |
| | | Melaksanakan Pemetaan Data Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) dan terpenuhinya penanganan kelompok rawan pangan | Penyusunan dan Analisis Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan, Penanganan Daerah Rawan/ Rentan Pangan |
| | Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Meningkatkan Skor PPH Konsumsi melalui Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi dan Promosi konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman.; | Analisis jumlah energi dan protein yang dikonsumsi, Penetapan skor PPH Konsumsi, Pelaksanaan Promosi peningkatan angka PPH konsumsi pangan |
| | | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdata Lokal | Pelaksanaan pendampingan, pelatihan dan kompetisi terkait penganekaragaman pangan dan gizi berbasis Sumber daya lokal |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat kota Prabumulih |
| | Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | Meningkatkan pemantauan harga, distribusi dan akses pangan untuk menjaga stabilitas pangan daerah | Pelaksanaan pemantauan harga, distribusi dan akses pangan untuk menjaga stabilitas pangan daerah |
| | | Meningkatkan volume beras cadangan pangan Pemerintah Kota secara kontinyu untuk memenuhi target Permentan Nomor 11 Tahun 2018 | Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada Permentan Nomor 11 Tahun 2018 |
| | | Mengembangkan dan Memantapkan kelembagaan dan regulasi ketahanan pangan | Pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Cadangan Pangan Pemerintah |
| | 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan, Laporan keuangan dan Penyediaan Administrasi Keuangan |
| | | Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah |
| | | Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya |
| | | Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan-kegiatan penyusunan Perencanaan, Penganggaran Evaluasi dan Pelaporan |
| | | Peningkatan Pemeliharaan barang Milik Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan OPD dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 -2023 semula mengacu Permendagri Permendagri 13 Tahun 2006. Kemudian dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 50 Tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menyesuaikan rencana Program dan Kegiatan OPD sesuai amanat Permendagri tersebut.

Semula Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 8 (delapan) Program yang meliputi 48 Kegiatan yaitu:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan:
2. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
3. Program Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
7. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Dengan adanya perubahan nomenklatur melalui Permendagri Nomor 50 Tahun 2020, terjadi perampingan menjadi 4 Program dan 15 Kegiatan sebagai berikut:

| |
|---|
| 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
| 2.09.03.2.01 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
| <u>Sub Kegiatan:</u> |
| 2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan |
| 2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| 2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |
| 2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan |

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2.09.03.2.02

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2.09.03.2.03

Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Sub Kegiatan:

2.09.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

2.09.03.2.04

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dengan dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan:

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

2.09.04.2.01

Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan:

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2.09.04.2.02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.09.05.2.01

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.XX.01.2.02

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

X.XX.01.2.03

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

X.XX.01.2.05

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

X.XX.01.2.06

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

X.XX.01.2.07

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

X.XX.01.2.08

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X.XX.01.2.09

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berikut ini Rencana, Program Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mengacu kepada RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023

Tabel 6.1 (TC 27.a) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih Tahun Ke 1 dan Ke 2

| (Permendagri 13/2006,Permendagri 86/2017 RPJMD, Renstra, RKPD sebelum di revisi) | | | | | | | | | KONVERSI PERMENDAGRI 50 TAHUN 2020 | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------|----|-----------|----|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| | | | | | TA 2019 | | TA 2020 | | TA 2021 | TA (2022) | | TA (2023) | |
| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Output | Target | Rp | Target | Rp | Rp | | | | |
| Tujuan 1. Meningkatnya Stabilitas Pangan Daerah | sasaran 2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup Bermutu dan Terjangkau | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (NBM-PPH) | Tersedianya Data NBM- PPH Ketersediaan Kota Prabumulih | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Media Informasi Pangan | Tersedianya Sarana/ Media Informasi untuk Ekspose Harga dan Pasokan Pangan | | | | | | | | | |
| | | Program Diversifikasi Pangan dan Gizi | Kegiatan Peningkatan Kreasi Pangan Olahan | Terlaksananya Penilaian Lomba Kreasi Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal | 1 Kali | | 1 Kali | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat | Tersedianya Informas/Data Akses Pangan Masyarakat | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan Stock Pangan Pokok Strategis | Tersedianya Informasi/Data Pasokan/Stok Pangan Pokok Kota Prabumulih | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Panel Stock Pangan Pokok HBKN | Terlaksananya Sidak Gabungan untuk mendapatkan informasi pasokan/stok pangan pokok Menjelang HBKN | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok | Tersedianya Informas/Data Harga Pangan Pokok Kota Prabumulih | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Panel Harga Pangan HBKN | Terlaksananya Sidak Gabungan untuk mendapatkan informasi harga pangan pokok Menjelang HBKN | | - | - | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kelompok Wanita Tani Pangan Olahan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan kapasitas SDM Pangan Olahan Bagi Kelompok Wanita Tani | 30 Orang | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Secara Terpadu | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terpadu | 90 Orang | | 90 Orang | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan | Data & Informasi Jaringan Distribusi Pangan Pokok | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Adhykarya Pangan Nusantara (APN) | Terlaksananya seleksi penerima penghargaan Adhykarya Pangan Nusantara (APN) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dalam Mengantisipasi Kondisi Darurat | Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota | 10 Ton | | 13 Ton | | | | | | |
| | | Program Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan dan Regulasi Ketahanan Pangan | Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Ketahanan Pangan | Tersusunnya Perda Bidang Ketahanan Pangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | Tersedianya Data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kota Prabumulih | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penilaian Halaman Asri, Teratur dan Nyaman | Terlaksananya Penilaian Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman | 1 Kali | | 1 Kali | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Gerakan Tanam Buah-buahan di Lahan Pekarangan | Terlaksananya Gerakan Tanam buah-buahan di Lahan Pekarangan Keluarga | 120 KK | | 120 KK | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari | Output: Terlaksananya pendampingan KRPL | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan | Terbinanya kelompok-kelompok yang akan mengikuti Penilaian Halaman Asri Tertib Indah dan Nyaman | 6 Kelompok | | 6 Kelompok | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pembinaan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Terbinanya Kelompok-kelompok yang akan mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA | 12 Kelompok | | 12 Kelompok | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Optimalisasi dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Lahan Pekarangan | Terlaksananya Optimalisasi dan Pemanfaatan TOGA di lahan Pekarangan kelompok | | | 6 Kelompok | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penilaian Kelompok-Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan | Terlaksananya Penilaian Lomba Ketahanan Pangan UP2K | 1 Kali | | 1 Kali | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Apresiasi Kader Pangan | Jumlah Kader yang Mengikuti Kegiatan Apresiasi Kader Pangan | 300 Orang | | 300 Orang | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) | Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan dan Pendampingan P2KP | 3 Kelompok | | 3 Kelompok | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Peningkatan Penganekaragaman Pangan | Terlaksananya Penilaian Lomba Cipta Menu B2SA | 1 Kali | | 1 Kali | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Tanaman Pekarangan/ Pangan Olahan Unggulan Daerah | Terlaksananya kegiatan pameran dan mobil hias | 1 Stand & 1 Mobil Hias | | 1 Stand & 1 Mobil Hias | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) | Tersedianya fasilitas/dana untuk mengikuti kegiatan HPS Ke Luar Daerah | | | 1 Kali | | | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih | Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Prabumulih untuk Membahas Isu-isu strategis | 1 Kali | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penyusunan dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) | Lokasi/Wilayah Pemetaan Masyarakat Rentan Pangan | | | 6 Kecamatan | | | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | Terlaksananya Pemberian Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Rentan Pangan dan PMT Kepada anak Kurang Gizi dari kelompok Rentan Pangan | 100 KK | | 120 KK | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan | Persentase Pelaksanaan Pengujian Sample Pangan Segar | 90 | | 92 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Terbinanya kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan | 2 Desa | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Kegiatan Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Pemetaan Masyarakat Rentan Pangan dan Tahan Pangan Terlaksana Data Tersedia dan Akurat Bagi Pengambil Kebijakan | 6 Kecamatan | 20.000.000 | | | | | | | | |
| Tujuan 2, Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan | Sasaran 2. meningkatkan Capaian Kinerja dan Keuangan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai yang Tersedia | 270 Materai 3000, 279 materai 6000 | | 270 Materai 3000, 279 materai 6000 | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya | 19 Unit | | 19 Unit | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | 19 Unit | | 19 Unit | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang | 7 Orang | | 7 Orang | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 52 Jenis | | 52 Jenis | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah/jenis Barang Cetak & Penggandaan | 9 Jenis | | 9 Jenis | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah/jenis peralatan rumah tangga | 12 Jenis | | 12 Jenis | | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Jumlah/jenis Surat Kabar /Majalah | 4 Surat Kabar/Majalah | | 4 Surat Kabar/Majalah | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah/jenis bahan logistik kantor | 3 Jenis | | 3 Jenis | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman | Jumlah Porsi Makanan & Minuman Rapat | 710 Porsi | | 710 Porsi | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Tersedianya Dana untuk Koordinasi/Konsultasi ke Luar Provinsi (58 OH) dan Dalam Provinsi (119 OH) | 177 OH | | 177 OH | | | | | | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya Dana untuk Koordinasi/Konsultasi di Dalam Daerah (119 OH) | 64 OH | | 64 OH | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Hardware dan Software/ Jaringan Komputer | Jumlah Hardware/Software yang Dipelihara Secara Berkala | 2 Jenis | | 2 Jenis | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah/Jenis Pengadaan Kendaraan Dinas | - | - | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kegiatan Pengadaan Hardware dan Software | Jumlah/Jenis Pengadaan Software/Hardware | | | 3 jenis | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga | 27 Stel | | 28 Stel | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Tersusunnya LAKIP DKP | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD | Tersediannya Dokumen RKA OPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Revisi DPA) APBD | Tersediannya RKA Perubahan/ Pergeseran OPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis/Review Rencana Strategis | Output: Tersediannya Dokumen RENSTRA/ Review RENSTRA OPD | 1 Dokumen | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja (RENJA) SKPD | Tersediannya Dokumen RENJA OPD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP | Tersediannya dokumen maturitas SPIP dan laporan review maturitas SPIP | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Tersediannya Dokumen LPPD | | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksannnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | | | | | | |

Tabel 6.2. (TC.27B) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih Tahun Ke 3, 4 dan 5

| (Permendagri 13/2006,Permendagri 86/2017 RPJMD, Renstra, RKPD sebelum di revisi) | | | | | | | | | KONVERSI PERMENDAGRI 50 TAHUN 2020 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|---|---------|-----|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--------------------------|----|-----------|----|-------------------------|----|
| | | | | | TA 2019 | | TA 2020 | | | | | | | | TA 2021 | | TA 2022 | | TA 2023 | |
| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Output | Targ et | R p | Targ et | R p | Program | Hasil Program / Outcome | Kegiatan | Keluaran Kegiatan/ Output | Sub Kegiatan | Output Sub Kegiatan | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| Tujuan 1. Meningkatkan Stabilitas Pangan Daerah | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup, Bermutu dan terjangkau | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (NBM PPH) | Tersedianya Data NBM PPH Kota Prabumulih | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, bermutu dan terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya Data NBM-PPH Ketersediaan Kota Prabumulih | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Media Informasi Pangan | Tersedianya Sarana Informasi/Media Informasi untuk Ekspose Harga dan Pasokan Pangan | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, bermutu dan terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya sarana/media Informasi untuk Ekspose Harga, Pasokan, Cadangan dan Konsumsi Pangan kepada sektor publik | Media Cetak dan Bulletin | | 2 Media | | Ekspose di Media Online | |
| | | Program Diversifikasi Pangan dan Gizi | Kegiatan Peningkatan Kreasi Pangan Olahan | Terlaksananya Penilaian Lomba Kreasi Pangan Olahan Bebas Sumberdaya Lokal | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal | Terlaksananya Penilaian Lomba Kreasi Pangan Olahan Inovatif Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Kali | | 3 Jenis | | 3 Pemenang Lomba | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|-----------|------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Penyediaan Pangan segar berbasis sumberdaya Lokal (Stabilisasi Pangan menjelang HBKN) | 5 Jenis | 5 Komoditi | 0 | Penyediaan 10 (sepuluh) jenis pangan segar untuk stabilisasi harga pangan menjelang HBKN | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat | Tersedianya Informasi/Data Akses Pangan Masyarakat | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya | Tersedianya Data/Informasi Sistem Distribusi Pangan Pokok di Kota Prabumulih | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan Stock Pangan Pokok Strategis | Tersedianya Informasi/Data Pasokan/Stock Pangan Pokok Kota Prabumulih | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya Laporan Pasokan/Stock Pangan Pokok Mingguan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok | Tersedianya Informasi/Data Harga Pangan Pokok Kota Prabumulih | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya Laporan Pemantauan Harga Pangan Pokok Operasional Satgas Pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--------|---|--------|---|--------|---|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) | Terlaksananya seleksi penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Pangan masyarakat Melalui Adhikarya pangan Nusantara | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dalam jangkauan harga dan pasokan yang stabil | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Tersedianya TTIC di Kota Prabumulih | - | - | - | - | 1 TTIC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dalam Mengantisipasi kondisi Darurat | Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang dikelola mendekati Kuota Standard Kota Prabumulih | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota | 11 ton | | 11 ton | | 16 ton | 2 |
| | | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang dikelola mendekati Kuota Standard Kota Prabumulih | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi tim cadangan Pangan Kab/Kota | - | - | - | - | - | - |
| | | Program Pengembangan dan Pemantapan Kelembagaan dan Regulasi Ketahanan Pangan | Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Ketahanan Pangan | Tersusunnya Perda Bidang Ketahanan Pangan | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota yang dikelola mendekati Kuota Standard Kota Prabumulih | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota | Tersusunnya Perda Bidang Ketahanan Pangan | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|------------|------------|---|-----------|---|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | Tersedianya Data Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat Kota Prabumulih | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun | Tersedianya Laporan PPH Konsumsi Pangan Konsumsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penilaian Halaman Asri, Teratur dan Nyaman | Terlaksananya Penilaian Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penilaian Kompetisi Pemanfaatan Pekarangan untuk pemenuhan konsumsi keluarga | - | - | - | - | - |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Gerakan Tanam Buah-buahan di Lahan Pekarangan | Terlaksananya Gerakan Tanam buah-buahan di Lahan Pekarangan Keluarga | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Tanam Buah-buahan di Lahan Pekarangan Keluarga | - | - | - | 3 KWT | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari | Output: Terlaksananya pendampingan KRPL | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemeliharaan Obor Pangan Lestari | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 30 Orang | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan | Terbinanya kelompok-kelompok yang akan mengikuti Penilaian Halaman Asri Terib Indah dan Nyaman | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan budidaya sayuran | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan Budidaya Jamur Tiram | 2 kwt | 2 kwt | 0 | 3 kwt | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|------------------|--|------------------|---|--------------------------|---|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Pembinaan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) | Terbinanya Kelompok-kelompok yang akan Mengikuti Lomba Cipta Menu B2SA | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kelompok masyarakat yang fokus terhadap cipta menu keluarga untuk peningkatan angka konsumsi pangan | 6 tim | | 6 TIM | | 30 Orang | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) di lahan pekarangan | Terlaksananya Optimalisasi dan pemanfaatan TOGA di lahan pekarangan kelompok | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui budidaya dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) | 14 kwt | | 14 kwt | | 30 kwt | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penilaian kelompok - kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan | terlaksananya penilaian lomba ketahanan pangan UP2K | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui penilaian lomba pangan olahan bagi kelompok UP2K | 6 kelompok up2k | | 6 Kelompok UP2K | 0 | 6 Pemenang kelompok up2k | |
| | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan kelompok pangan olahan UP2K | 3 kelompok | | 3 kelompok | 0 | 3 kelompok | 1 |
| | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan TOGA di Lahan Pekarangan menjadi Minuman Herbal | 120 orang | | 120 orang | 0 | 120 orang | 1 |
| | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan KWT Pemanfaatan Pekarangan | 6 kwt | | 6 kwt | 0 | 6 kwt | |
| | | | | | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerak Aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Penilaian lomba halaman asri, indah, dan nyaman | 6 kwt/dasawi sma | | 6 kwt/dasawi sma | | 6 pemenang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|-----------------|--|------------|---|-----------------------------|--|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Apresiasi Kader Pangan | Jumlah Kader yang Mengikuti Kegiatan Apresiasi Kader Pangan | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kader Pangan | 100 orang | | 100 orang | | 150 orang | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Percepatan Penggerakannya Konsumsi Pangan (P2KP) | Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan dan Pendampingan P2KP | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan P2KP | 3 kwt | | 3 kwt | | 3 kwt | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Peningkatan Penggerakannya Pangan | Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya penilaian lomba konsumsi pangan B2SA | 6 kelompok up2k | | 6 tim | 0 | 6 pemenang lomba B2SA | |
| | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Tanaman Pekarangan/ Pangan Olahan Unggulan Daerah | Terlaksananya kegiatan pameran dan mobil hias | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui Promosi dan edukasi Produk Pangan lokal Melalui Pameran dan pawai | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | Pameran dalam dan luar kota | |
| | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) | Tersedianya fasilitas/dana untuk mengikuti kegiatan HPS Ke Luar Daerah | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat melalui Ekspose Penggerakannya Konsumsi Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal (HPS) | - | | - | - | - | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih | Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Prabumulih | | | | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan Ketersediaan Pangan yang cukup, Bermutu dan Terjangkau | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun mendekati angka ideal sesuai dengan AKG | Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Konsumsi per kapita per tahun | Terlaksananya Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk Mengevaluasi dan Merumuskan Kebijakan Konsumsi Pangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|------------------|---|------------|---|---|--|
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penyusunan dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan /FSVA | Lokasi/Wilayah Pemetaan Masyarakat Rentan Pangan | | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Daerah rawan Pangan Tertangani | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Penyusunan, Pemutakhiran & Analisis Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan | Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | Terlaksananya Pemberian Bantuan Sembako bagi Kepala Keluarga Rentan Pangan dan PMT Kepada anak Kurang Gizi dari kelompok Rentan Pangan | | | | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Daerah rawan Pangan Tertangani | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Tertanganinya Masyarakat Rawan Pangan/Rentan Pangan di Daerah | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, & Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberian Bantuan Sembako bagi KK Rentan Pangan dan PMT Kepada anak Kurang Gizi dari Kelompok Rentan Pangan | 100 kk | | 100 kk | | 175 paket sembako untuk masyarakat rentan pangan dan 175 anak kurang gizi | |
| | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Kegiatan Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan | Persentase Pelaksanaan Pengujian Sample Pangan Segar | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Keamanan Pangan Terjamin | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengujian Sample Pangan Segar | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 30 orang 1 paket pengadaa n | |
| | | | | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Keamanan Pangan Terjamin | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan | Persentase Pelaksanaan Penguatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | - | - | 50 Orang | | - | |
| | | | | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Keamanan Pangan Terjamin | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan | Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan | - | - | - | | 4 Komoditas | |
| | | | | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Keamanan Pangan Terjamin | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan | Persentase Pelaksanaan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan | 2 komoditi | | 2 komoditi | | 4 komoditas | |
| | | | | | | | | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Keamanan Pangan Terjamin | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan | Persentase Pelaksanaan Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan | 2 komoditi | | 2 komoditi | 0 | 4 komoditas | |
| | | Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Terbinanya kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan | | | | | | | | | Terbinanya kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan | | Terbinanya kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan | Kegiatan dihapus | | | | | |

2018-2023

69

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|-----------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|
| | | Program pelayanan administrasi perkantoran | Kegiatan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan | Jumlah/jenis surat kabar majalah | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah/jenis surat kabar/majalah | 4 Surat kabar/majalah | | 4 jenis | | 4 jenis | |
| | | Program pelayanan administrasi perkantoran | Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah/jenis bahan logistik kantor | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatkan pelayanan administrasi umum | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah/jenis bahan logistik kantor, jumlah porsi makanan & minuman rapat | 1 jenis, 3 jenis | | 1 jenis, 3 jenis | | 4 jenis | |
| | | Program pelayanan administrasi perkantoran | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya dana untuk koordinasi/konsultasi ke luar provinsi (58 OH) dan dalam provinsi (119 OH) | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatkan pelayanan administrasi umum | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Tersedianya dana untuk koordinasi/konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah | 315 OH | | 315 OH | | 315 OH | |
| | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala hardware dan software/jaringan komputer | Jumlah Hardware/software yang dipelihara secara berkala | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan Pemeliharaan Barang milik Daerah | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah hardware/software yang dipelihara secara berkala | 3 jenis | | 3 jenis | | 6 jenis | |
| | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah/Jenis pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah | Pengadaan kendaraan dinas/operasional atau lapangan | Jumlah/Jenis pengadaan kendaraan dinas | - | - | - | 0 | - | - |
| | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Kegiatan pengadaan hardware dan software | Jumlah/Jenis pengadaan software/hardware | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatkan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah/Jenis pengadaan peralatan dan mesin | 2 jenis | | 2 jenis | | 4 item (2 laptop, 2 printer) | |
| | | Program peningkatan disiplin aparatur | Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pengadaan pakaian olahraga | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan atribut kelengkapannya | 30 Stel | | 30 Stel | | 38 stel | |
| | | | | | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimtek | - | | - | | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota | Meningkatn ya Pelaksanaa n Administras i dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN | 14 kali | | 14 kali | | 14 kali | 2 |
| | | | | | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota | Meningkatn ya Pelaksanaa n Administras i dan Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah | Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Tersusunnya analisis jabatan (1 dokumen) | - | - | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Tersusunnya LAKIP DKP | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Perencanaan penganggara n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) | Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAKIP) | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan semesteran | Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD | Tersedianya Laporan keuangan semesteran | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD | Tersedianya Dokumen RKA OPD | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Perencanaan penganggara n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- Induk | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (revisi DPA)APBD | Tersedianya RKA Perubahan/Perges eran OPD | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Perencanaan penganggara n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan (RKAP) | Tersedianya Dokumen RKA Perubahan (RKAP) | 1 Dokumen | - - - - - | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan penyusunan rencana strategis/review rencana strategis | Tersedianya dokumen Renstra OPD | | | | | Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta | Meningkatn ya SAKIP | Perencanaan penganggara n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggara n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersedianya dokumen renstra/review renstra-PD/Revisi Renstra | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|--|---|--|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD | Tersedianya Dokumen RENJA OPD | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya SAKIP | Perencanaan penganggaran n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggaran n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersedianya Dokumen RENJA-PD | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP | Tersedianya dokumen maturitas SPIP dan laporan review maturitas SPIP | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya SAKIP | Perencanaan penganggaran n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggaran n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Maturitas SPIP | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan | Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya SAKIP | Perencanaan penganggaran n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggaran n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi Kinerja Kegiatan Lingkup DKP | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | |
| | | Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Tersedianya Dokumen LPPD | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya SAKIP | Perencanaan penganggaran n evaluasi kinerja perangkat daerah | Meningkatnya sistem perencanaan, penganggaran n dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan 2018-2023 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Prabumulih sebagaimana tersebut pada Tabel berikut.

Tabel 7.1 (TC.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Ketersediaan protein (Gram/kap/hari) | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| | Teranalisisnya Skor NBM PPH | | | | | | | |
| 2 | Skor Ketersediaan/ Stock Pangan Pokok | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 3 | Terpantaunya Stok pangan pokok menjelang HBKN | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 4 | Terpantaunya akses pangan masyarakat | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 5 | Terpantaunya harga pangan pokok secara periodik | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 6 | Terpantaunya jaringan distribusi pangan | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 7 | Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi harga pangan di media Cetak | - | - | 1 Media Cetak | 1 Media Cetak | 1 Media Cetak | 1 Media Cetak | 1 Media Cetak |
| 8 | Terpantaunya harga pangan komoditas pangan utama di Hari Besar Keamanan Nasional (HBKN) oleh Tim Gabungan | - | - | | | | | |
| 9 | Angka Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari) | 1 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | Angka Konsumsi Protein (Gram/kap/hari) | | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen |
| 10 | Terlaksananya Penilaian Lomba Halaman Asri Tertib, Indah dan Nyaman Pemenang lomba hatinya PKK | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali |
| 11 | Persentase Pelaksanaan Pengujian sample Pangan Segar | 85% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 25 kali |
| 12 | Terlaksananya penanaman tanaman buah dilahan pekarangan kelompok sasaran guna peningkatan konsumsi pangan dan gizi keluarga | - | 120 KK | 120 KK | 120 KK | 120 KK | 120 KK | 600 KK |
| 13 | Terlaksananya Pemberdayaan Pekarangan Kelompok Pangan Lestari dengan baik dan berkelanjutan | - | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 30 kelompok |
| 14 | Terbinanya Kelompok-kelompok yang siap untuk mengikuti kompetisi/penilaian Lomba Halaman Asri, Indah dan Nyaman -Tanaman Sayuran - Jamur Tiram | - | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 30 kelompok |
| 15 | Terbinanya kapasitas Kelompok yang siap untuk mengikuti kompetisi/penilaian Lomba Cipta Menu B2SA | - | 12 kelompok | 12 kelompok | 12 kelompok | 12 kelompok | 12 kelompok | 60 kelompok |
| 16 | Terlaksananya pendampingan dan penyampaian bantuan kepada kelompok P2KP | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 30 kelompok |
| 17 | Terlaksananya Optimalisasi dan Pemanfaatan Tanaman TOGA di Lahan Pekarangan Kelompok | - | - | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 6 kelompok | 24 kelompok |
| 18 | Terbentuknya Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) Kota Prabumulih | - | - | - | | | | |
| 19 | Terlaksananya Penilaian lomba cipta menu B2SA (Gerakan Konsumsi B2SA) | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali |
| 20 | Terlaksananya Penilaian Lomba Kreasi Pangan Olahan | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali |
| 21 | Terlaksananya Penilaian Lomba Kelompok Ketahanan Pangan UP2K Terlaksananya Pembinaan UP2K Pelatihan Kelompok UP2K | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali |
| | | | | | 1 Kelompok 50 Orang | 1 Kelompok 50 Orang | 1 Kelompok 50 Orang | 3 Kelompok 150 Orang |
| 22 | Meningkatnya kapasitas anggota KWT Pangan Olahan peserta sosialisasi | - | 30 peserta | 30 peserta | 30 peserta | 30 peserta | 30 peserta | 150 peserta |
| 23 | Terpilainya Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) | | | | | | | |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD n |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 24 | Meningkatnya kapasitas & keterampilan kelompok sasaran untuk dapat memanfaatkan/memberdayakan lahan pekarangan secara terpadu | - | 90 peserta | 90 peserta | 90 peserta | 90 peserta | 90 peserta | 450 peserta |
| 25 | Meningkatnya pengetahuan/informasi Kader pangan sehubungan isu-isu ketahanan pangan & usaha ekonomi berbasis sumber daya lokal | - | 300 peserta | 300 peserta | 300 peserta | 300 peserta | 300 peserta | 1500 peserta |
| 26 | Keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan pawai pembangunan (mobil hias) | - | 1 stand dan 1 mobil hias | 1 stand dan 1 mobil hias | 1 stand dan 1 mobil hias | 1 stand dan 1 mobil hias | 1 stand dan 1 mobil hias | 5 stand dan 5 mobil hias |
| 27 | Keikutsertaan dalam kegiatan HPS Provinsi/ Nasional | - | - | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 20 orang |
| 28 | Tersedianya beras cadangan pangan pemerintah kota untuk mengantisipasi kondisi darurat | 13.250 KG | 10 ton | 13 ton | 13 ton | 13 ton | 13 ton | 75,25 Ton |
| 29 | Terlaksananya pemetaan masyarakat rentan pangan dan tahan pangan sehingga data tersedia akurat bagi pengambil kebijakan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan |
| 30 | Tersalurinya bantuan bagi kelompok masyarakat rawan pangan berupa paket sembako | 75 KK | 100 KK | 120 KK | 140 KK | 160 KK | 180 KK | 700 KK |
| 31 | Terbinanya Kelompok afinitas desa mandiri pangan yang dapat melaksanakan kegiatan dengan aktif secara berkelanjutan (%) | 3 Desa | 3 Desa | 3 Desa | | | | |
| 32 | Dewan ketahanan pangan berkoordinasi membahas isu-isu strategis ketahanan pangan Kota Prabumulih, serta permasalahan dan kebijakan terkait Ketahanan Pangan | 1 Kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali |
| 33 | Peraturan Daerah bidang ketahanan pangan (jumlah Perda) | - | - | 1 | | - | - | 2 |
| 34 | Terfasilitasi kegiatan administrasi persuratan dan berjalan lancar | 412 Materai | 549 Materai | 549 Materai | 549 Materai | 549 Materai | 549 Materai | 100% |
| 35 | Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional berjalan dengan baik dan tepat waktu | 94,00% | STNK 3 unit mobil & 16 unit motor | STNK 3 unit mobil & 16 unit motor | STNK 3 unit mobil & 16 unit motor | STNK 3 unit mobil & 16 unit motor | STNK 3 unit mobil & 16 unit motor | STNK 15 unit mobil & 80 unit motor |
| 36 | Terpenuhinya honorarium bagi pengelola administrasi keuangan dan Barang | 100% | 7 orang | 7 orang | 7 orang | 7 orang | 7 orang | 35 orang |
| 38 | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | 52 Jenis | 52 Jenis | 52 Jenis | 52 Jenis | 52 Jenis | 52 Jenis | 52 Jenis |
| 39 | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga | 12 Jenis | 12 Jenis | 12 Jenis | 12 Jenis | 12 Jenis | 12 Jenis | 100% |
| 40 | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan | 9 Jenis% | 9 Jenis% | 9 Jenis% | 9 Jenis% | 9 Jenis% | 9 Jenis% | 9 Jenis% |
| 41 | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% | 4 Surat Kabar/Majalah% |
| 42 | Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis% | 3 Jenis% | 3 Jenis% | 3 Jenis% | 3 Jenis% |
| 43 | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat | 710 Porsi | 710 Porsi | 710 Porsi | 710 Porsi | 710 Porsi | 710 Porsi | 710 Porsi |
| 44 | Terpenuhinya kebutuhan untuk berkoordinasi & berkonsultasi keluar daerah sehubungan tugas fungsi dinas | 177 OH | 177 OH | 177 OH | 177 OH | 177 OH | 177 OH | 177 OH |
| 45 | Terpenuhinya kebutuhan untuk berkoordinasi & berkonsultasi di dalam daerah sehubungan tugas fungsi dinas | 64 OH | 64 OH | 64 OH | 64 OH | 64 OH | 64 OH | 64 OH |

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 46 | Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 100% | service & BBM 3 unit mobil & 16 unit motor | service & BBM 3 unit mobil & 16 unit motor | service & BBM 3 unit mobil & 16 unit motor | service & BBM 3 unit mobil & 16 unit motor | service & BBM 3 unit mobil & 16 unit motor | service & BBM 15 unit mobil & 80 unit motor |
| 47 | Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/ berkala hardware & software jaringan komputer | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | Terpenuhinya kebutuhan peralatan & perlengkapan gedung kantor | - | - | 100% | - | 100% | - | 100% |
| 49 | Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional | - | - | 100% | 100% | - | - | 100% |
| 50 | Terpenuhinya kebutuhan hardware & software | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 51 | Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 52 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 53 | Laporan keuangan semesteran dan CALK semesteran | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 54 | Laporan keuangan akhir tahun dan CALK akhir tahun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 55 | RKA SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 56 | RKA perubahan/ pergeseran SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 57 | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 58 | RENSTRA/ Review RENSTRA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 59 | RENJA SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 60 | Dokumen maturitas SPIP dan laporan review maturitas SPIP | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |
| 61 | Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 5 dokumen |

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah dokumen perencanaan bidang ketahanan pangan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

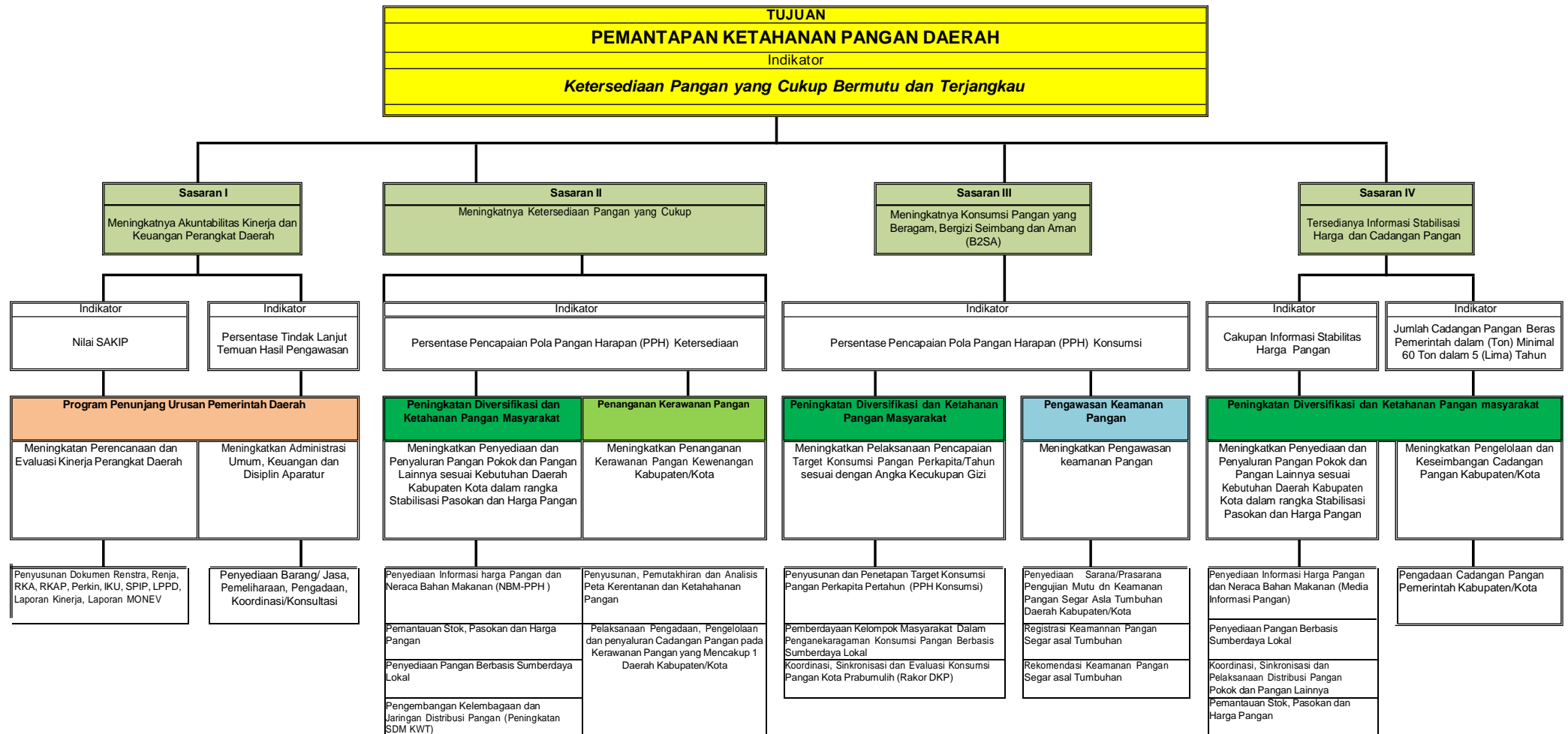
Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Revisi Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Prabumulih mengacu Permendagri Nomor 50 Tahun 2020.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan upaya yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Pelaksanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk berkinerja lebih baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH



Prabumulih, Juni 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih,

Suranti, SP
Pembina /IV.a
NIP. 19640325 198708 2 001

|



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Lt. 6
Jl. Jendral Sudirman Km. 12 Cambai
P R A B U M U L I H (0713) 3920011 Fax (0713) 3920019 ext. 6603-6604

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : /KPTS/DKP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN (REVISI) ATAS RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 telah disusun mengacu kepada Permendagr dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dan diberlakukan untuk lima tahun kedepan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perubahan Rencana Strategis Dinas ketahanan pangan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47. Tambahan negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih 2018-2023.
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37):

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran RPJMD Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika yaitu:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih;
- c. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan
- h. Penutup

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Prabumulih,
Pada Tanggal : Juni 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH

SURANTI, SP
PEMBINA Tk.I/IV.b
NIP. 1940325 198708 2 001

